

KAJIAN YURIDIS PERALIHAN HAK ATAS TANAH MELALUI HIBAH TANAH KE KELUARGA

(Studi Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Kdl)

Oleh:

Pradana Naufal Aly

E1A020217

ABSTRAK

Hibah merupakan salah satu bentuk peralihan hak atas tanah yang dilakukan secara sukarela dari pihak pemberi kepada penerima hibah selama pihak pemberi masih hidup. Hibah menjadi salah satu instrumen hukum yang sah untuk memberikan kepemilikan tanah, termasuk dalam lingkup keluarga. Namun, agar hibah tersebut sah secara hukum, diperlukan pemenuhan syarat formil dan materiil sesuai peraturan perundang-undangan, seperti pembuatan akta hibah oleh PPAT dan pendaftaran ke Kantor Pertanahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesesuaian dan keabsahan proses Hibah tanah ke Keluarga sesuai Peraturan perundang-undangan serta pertimbangan hakim terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen dalam perkara Putusan No. 21/Pid.B/2021/PN Kdl. Dalam kasus tersebut, ditemukan adanya pemalsuan tanda tangan pihak pemberi hibah yang digunakan untuk mengalihkan hak atas tanah secara tidak sah. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis ketentuan dalam KUH Perdata, UUPA, PP No. 24 Tahun 1997, PP No. 18 Tahun 2021, serta KUHP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan tersebut melanggar Pasal 263 KUHP dan menyebabkan hibah menjadi tidak sah serta merugikan pihak lain. Hakim menjatuhkan putusan bersalah terhadap terdakwa. Penelitian ini menegaskan pentingnya keabsahan administratif dan substansi hukum dalam peralihan hak atas tanah agar tidak menimbulkan sengketa dan kerugian hukum di kemudian hari.

Kata kunci: Hibah Tanah, Peralihan Hak, Pemalsuan Tanda Tangan.

JURIDICAL STUDY OF TRANSFER OF LAND RIGHTS THROUGH GRANTS

LAND TO FAMILY

(Study of Decision Number 21/Pid.B/2021/PN Kdl)

**by: Pradana Naufal Aly
E1A020217**

ABSTRACT

Grant is a form of transfer of land rights that is carried out voluntarily from the grantor to the grantee while the grantor is still alive. Grants are one of the legal instruments to grant land ownership, including within the family. However, in order for the grant to be legally valid, it is necessary to fulfill the formal and material requirements in accordance with statutory regulations, such as the making of a grant deed by a PPAT and registration with the Land Office. This study aims to examine the suitability and validity of the process of land grants to families in accordance with statutory regulations and the judge's consideration of the criminal act of document forgery in Case No. 21/Pid.B/2021/PN Kdl. In the case, it was found that the grantor's signature was forged which was used to transfer land rights illegally. The research uses a normative juridical approach by analyzing the provisions in the Civil Code, UUPA, PP No. 24 of 1997, PP No. 18 of 2021, and the Criminal Code. The results showed that the act violated Article 263 of the Criminal Code and caused the grant to be invalid and harmed other parties. The judge handed down a guilty verdict against the defendant. This research emphasizes the importance of administrative validity and legal substance in the transfer of land rights so as not to cause disputes and legal losses in the future.

Keywords: Land Grant, Transfer of Rights, Forgery of Signature.